

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Kota Semarang

2.1.1. Visi dan Misi Kota Semarang

Visi Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber Bhinneka Tunggal Ika. Visi tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan misi-misi antara lain: 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial; 2) Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila; 3) Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar, dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan; 4) Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota; 5) Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka NKRI.

2.1.2. Kondisi Geografis Kota Semarang

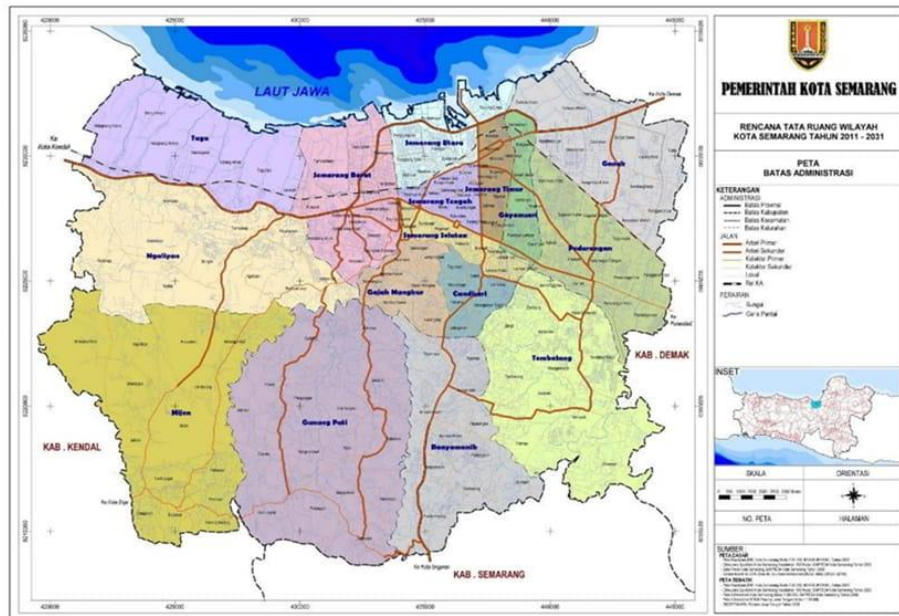
Kota Semarang merupakan salah satu kota strategis di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, dengan posisi geografis berada pada koordinat 6°50'–7°10' Lintang Selatan serta 109°35'–110°50' Bujur Timur. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai

pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Letak geografisnya yang berada pada jalur lalu lintas utama Pulau Jawa menjadikan kota ini sebagai koridor penting pembangunan regional dengan empat simpul gerbang utama, yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Peran strategis tersebut semakin diperkuat dengan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai, seperti keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol. Kehadiran fasilitas tersebut menjadikan Kota Semarang berfungsi sebagai simpul utama aktivitas pembangunan sekaligus pintu gerbang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah maupun di kawasan tengah Pulau Jawa.

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:

1. sebelah barat : Kabupaten Kendal
2. sebelah timur : Kabupaten Demak
3. sebelah selatan : Kabupaten Semarang
4. sebelah utara : Laut Jawa

Gambar 2. 1. Peta Kota Semarang



Sumber : PPID Kota Semarang

Jika ditinjau dari aspek kewilayahan, Kota Semarang termasuk dalam kawasan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan) yang secara keseluruhan meliputi 85 kecamatan, dengan Kota Semarang sendiri terbagi atas 16 kecamatan. Dalam konteks perkembangan dan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki peran yang sangat signifikan, terutama karena keberadaan pelabuhan, jaringan transportasi darat berupa jalur kereta api dan jalan raya, serta fasilitas transportasi udara yang menjadikannya simpul transportasi regional sekaligus kota transit di Jawa Tengah. Selain itu, posisi Semarang juga semakin penting karena memiliki keterhubungan langsung dengan wilayah di luar Pulau

Jawa, sehingga memperkuat perannya sebagai pusat wilayah nasional di bagian tengah.

Dalam kerangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan bagian dari kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR yang menjadi pusat aktivitas perdagangan, jasa, industri, serta pendidikan. Lebih jauh lagi, Kota Semarang juga termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama Kota Yogyakarta dan Surakarta. Fungsi strategis Semarang sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan mendorong percepatan pembangunan kota, karena sektor-sektor tersebut mampu menarik aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi, sekaligus meningkatkan arus pendatang yang berkontribusi pada dinamika perkotaan. Seiring perkembangannya, Kota Semarang tumbuh menjadi kota perdagangan dan jasa, di mana kedua sektor tersebut berperan sebagai tulang punggung pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Letak geografis yang strategis semakin diperkuat dengan adanya proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa yang melintasi wilayah Kota Semarang sebagai bagian dari program strategis nasional. Keberadaan infrastruktur tersebut menjadikan Semarang berpotensi besar menjadi kota transit utama yang mendorong peningkatan mobilitas orang maupun barang. Tingginya mobilitas tersebut erat kaitannya dengan aksesibilitas dan konektivitas, di mana kota dengan tingkat mobilitas yang baik mampu mendukung kelancaran aktivitas masyarakatnya dan memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan.

2.1.3. Kondisi Administratif Kota Semarang

Kota Semarang memiliki luas wilayah sekitar 373,70 km² atau setara dengan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Dari segi administrasi

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Kelurahan
Mijen	57,55	14
Gunungpati	54,11	16
Banyumanik	25,69	11
Gajahmungkur	9,07	8
Semarang Selatan	5,93	10
Candisari	6,54	7
Tembalang	44,20	12
Pedurungan	20,72	12
Genuk	27,39	13
Gayamsari	6,18	7
Semarang Timur	7,70	10
Semarang Utara	10,97	9
Semarang Tengah	6,14	15
Semarang Barat	21,74	16
Tugu	31,78	7
Ngaliyan	37,99	10
Kota Semarang	373,70	177

pemerintahan, wilayah ini terbagi menjadi 16 kecamatan dengan 177 kelurahan sebagai unit terkecil penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2. 1. Data Kepadatan Penduduk Kota Semarang

Sumber : Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kota Semarang Tahun 2016-2020

Berdasarkan data pada tabel 2.1. menunjukkan luas wilayah dan jumlah kelurahan tiap kecamatan di Kota Semarang, dapat dilihat bahwa secara administratif kota ini terbagi menjadi 16 kecamatan dengan total luas 373,70 km² dan 177 kelurahan. Kondisi ini menunjukkan keragaman karakter wilayah, baik dari sisi ukuran geografis maupun tingkat kepadatan permukiman. Wilayah dengan cakupan terluas adalah Mijen yang mencapai sekitar 57,55 km² dengan 14 kelurahan, diikuti Gunungpati seluas 54,11 km² dan memiliki 16 kelurahan. Kedua

kecamatan ini berada di bagian barat daya kota dan dikenal memiliki kontur lahan perbukitan, sehingga wajar jika memiliki luasan terbesar namun jumlah kelurahan tidak terlalu padat. Sementara itu, kecamatan seperti Banyumanik (25,69 km²), Tugu (31,78 km²), dan Ngaliyan (37,99 km²) juga tergolong luas, umumnya menjadi kawasan pengembangan permukiman baru dan pusat aktivitas pendidikan maupun industri ringan.

Sebaliknya, kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Semarang Selatan yang hanya sekitar 5,93 km², Semarang Tengah seluas 6,14 km², serta Gajahmungkur dengan 9,07 km². Meskipun kecil, kawasan ini merupakan pusat kota yang padat penduduk dan menjadi lokasi berbagai kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Kepadatan juga tercermin dari jumlah kelurahan yang relatif besar dibanding luasnya, seperti Semarang Tengah yang memiliki 15 kelurahan dalam area yang sangat terbatas. Kecamatan lainnya seperti Tembalang dengan luas 44,20 km² dan 12 kelurahan berkembang pesat sebagai kawasan pendidikan dan permukiman mahasiswa, sedangkan Pedurungan (20,72 km², 16 kelurahan) menjadi salah satu pusat pertumbuhan permukiman padat di bagian timur kota. Semarang Barat yang memiliki luas 21,74 km² dengan 16 kelurahan juga berperan penting sebagai kawasan perdagangan dan perindustrian.

Secara keseluruhan, distribusi luas dan jumlah kelurahan ini memperlihatkan bahwa wilayah dengan luas besar umumnya berada di pinggiran kota dan memiliki kepadatan yang lebih rendah, sedangkan wilayah inti kota cenderung sempit tetapi menampung jumlah kelurahan yang banyak sebagai konsekuensi dari aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan permukiman yang padat.

Hal ini menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang, penyediaan infrastruktur, dan pengelolaan pelayanan publik di Kota Semarang.

2.1.4. Kondisi Demografis Kota Semarang

Kondisi demografi penduduk Kota Semarang tercermin melalui dinamika pertumbuhan jumlah dan tingkat kepadatan penduduk yang tersebar di seluruh wilayah administrasinya. Pertumbuhan jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, menandakan adanya perkembangan yang konsisten dalam aspek kependudukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, perkembangan jumlah penduduk yang telah diklasifikasikan menurut masing-masing kecamatan selama periode 2018 hingga 2022 dapat diamati secara lebih rinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Data Kepadatan Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Mijen	80.906	83.321	85.818	89.948	93.088
Gunung Pati	98.023	98.343	98.674	100.752	101.577
Banyumanik	142.076	141.689	141.319	143.433	143.746
Gajah Mungkur	56.232	55.857	55.490	56.350	56.334
Semarang Selatan	62.030	61.616	61.212	62.179	62.018
Candisari	75.456	74.952	74.461	75.614	75.442
Tembalang	189.680	191.560	193.480	198.862	201.821
Pedurungan	193.151	193.128	193.125	196.526	197.468
Genuk	123.310	125.967	128.696	132.473	137.356
Gayamsari	70.261	69.792	69.334	70.409	70.388
Semarang Timur	66.302	65.859	65.427	66.481	66.475
Semarang Utara	117.605	116.820	116.054	117.887	117.865
Semarang Tengah	55.064	54.696	54.338	55.213	55.208
Semarang Barat	148.879	147.885	146.915	149.326	149.327
Tugu	32.822	32.948	33.079	33.795	34.092
Ngaliyan	141.727	142.131	142.553	145.495	146.628
Kota Semarang	1.653.524	1.656.564	1.659.975	1.694.743	1.708.833

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.2 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk Kota Semarang pada periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren pertumbuhan yang konsisten di hampir seluruh kecamatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kota Semarang meningkat dari 1.653.524 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.708.833 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya dinamika demografis yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alami serta kemungkinan faktor migrasi masuk, mengingat Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah memiliki daya tarik ekonomi dan sosial yang cukup tinggi.

Jika dicermati per kecamatan, pertumbuhan penduduk terjadi relatif merata, meskipun dengan laju yang bervariasi. Kecamatan-kecamatan dengan karakter kawasan perkotaan yang padat seperti Tembalang, Banyumanik, dan Pedurungan menunjukkan jumlah penduduk yang besar dengan tren peningkatan yang konsisten. Tembalang, misalnya, meningkat dari 189.680 jiwa pada tahun 2020 menjadi 201.821 jiwa pada tahun 2024, menandakan kawasan ini semakin berkembang sebagai pusat permukiman baru dan kawasan pendidikan yang menarik penduduk baru setiap tahunnya. Banyumanik juga mengalami kenaikan dari 142.076 jiwa menjadi 143.746 jiwa pada periode yang sama, sejalan dengan fungsinya sebagai kawasan perumahan dan aksesibilitas yang baik menuju pusat kota.

Kecamatan lain seperti Semarang Barat, Pedurungan, dan Genuk juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Semarang Barat, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, mengalami kenaikan dari 148.879 jiwa pada tahun 2020 menjadi 149.327 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, Pedurungan

yang dikenal sebagai daerah perbatasan timur kota meningkat dari 193.151 jiwa menjadi 197.468 jiwa, menunjukkan peran strategisnya sebagai wilayah hunian dengan kepadatan penduduk tinggi. Genuk, yang memiliki karakter campuran industri dan permukiman, naik dari 123.310 jiwa menjadi 137.356 jiwa, menandakan peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan penduduk.

Di sisi lain, kecamatan dengan luas wilayah relatif besar namun tingkat kepadatan lebih rendah seperti Mijen dan Gunung Pati juga mengalami pertumbuhan meskipun dalam skala lebih moderat. Mijen bertambah dari 80.906 jiwa menjadi 93.088 jiwa dalam kurun lima tahun, sedangkan Gunung Pati meningkat dari 98.023 jiwa menjadi 101.577 jiwa. Peningkatan di wilayah ini menunjukkan adanya ekspansi permukiman ke area pinggiran seiring dengan pertumbuhan kebutuhan hunian dan pengembangan kawasan perkotaan. Kecamatan dengan populasi lebih kecil seperti Tugu dan Gajah Mungkur tetap menunjukkan kenaikan meskipun relatif lambat. Misalnya, Gajah Mungkur meningkat dari 56.232 jiwa menjadi 59.346 jiwa, sedangkan Tugu naik dari 32.822 jiwa menjadi 35.902 jiwa. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun wilayahnya tidak sepadat kecamatan lain, proses urbanisasi tetap memberikan kontribusi pada pertumbuhan penduduk.

2.1.5. Kondisi Perekonomian Kota Semarang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang tahun 2024, perekonomian Kota Semarang pada tersebut menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,62 persen, meskipun sedikit melambat

dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 5,79 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp 267.551,35 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 170.947,72 miliar. Struktur ekonomi Kota Semarang masih didominasi oleh sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 28,35 persen, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 26,87 persen, serta perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 12,95 persen. Dari sisi pertumbuhan, sektor jasa perusahaan mencatat kinerja tertinggi dengan laju sebesar 10,38 persen, disusul sektor jasa pendidikan sebesar 9,28 persen, serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,69 persen.

Sementara itu, dari perspektif pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar dengan kontribusi 40,94 persen terhadap total PDRB. Namun, laju pertumbuhan tertinggi justru tercatat pada konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRRT) yang mencapai 13,26 persen. Selain itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga tumbuh 6,52 persen yang menandakan adanya aktivitas investasi yang relatif stabil. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian Kota Semarang masih ditopang oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa, dengan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan. Walaupun terjadi perlambatan, perekonomian Kota Semarang tetap menunjukkan daya tahan serta diversifikasi yang cukup baik dalam menghadapi dinamika regional maupun nasional.

2.1.6. Kondisi Sosial Budaya dan Pendidikan Kota Semarang

Kota Semarang memiliki kondisi sosial, budaya, dan pendidikan yang cukup beragam dan dinamis. Dari sisi sosial budaya, masyarakat Semarang

didominasi oleh etnis Jawa dengan persentase terbesar, disusul oleh etnis Tionghoa dan kelompok lainnya. Kehidupan sosial masyarakat juga menunjukkan keragaman agama, dengan mayoritas beragama Islam, diikuti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, serta Kong Hu Cu. Keragaman ini mencerminkan Semarang sebagai kota multikultural yang mampu menjaga toleransi dan harmonisasi kehidupan antarwarga. Merujuk pada publikasi resmi Kota Semarang yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, terdapat data mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2024, yang disajikan dalam satuan jiwa.

Tabel 2. 3. Data Jumlah Pemeluk Agama di Kota Semarang

Jumlah Pemeluk Agama (satuan jiwa)					
Islam	Protestan	Katolik	Buddha	Hindu	Lainnya
1.485.169	115.684	83.960	1.165	9.958	430

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan tabel 2.2. mengenai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang tahun 2024, komposisi penduduk berdasarkan agama menunjukkan adanya keragaman keyakinan di masyarakat. Jumlah pemeluk agama Islam tercatat sebagai kelompok terbesar, yakni sebanyak 1.485.169 jiwa. Selanjutnya, penganut agama Protestan berjumlah 115.684 jiwa, sedangkan pemeluk agama Katolik tercatat sebanyak 83.960 jiwa. Jumlah penganut agama Hindu mencapai 9.958 jiwa, diikuti oleh agama Buddha dengan 1.165 jiwa, dan kelompok dengan keyakinan lainnya sebanyak 430 jiwa.

Data ini memperlihatkan bahwa masyarakat Kota Semarang didominasi oleh penduduk beragama Islam, namun tetap menunjukkan keberagaman dengan adanya pemeluk agama lain yang hidup berdampingan. Keberagaman tersebut menjadi salah satu ciri khas Semarang sebagai kota multikultural, yang mampu memadukan harmoni sosial di tengah pluralitas agama dan budaya. Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi ini dapat menjadi modal sosial penting dalam mendukung terciptanya toleransi, kohesi sosial, serta stabilitas masyarakat. Pendidikan di Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pada tingkat dasar, penerapan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah di SD Muhammadiyah Kota Semarang dinilai efektif karena guru, lingkungan sekolah, serta pengembangan nilai karakter bangsa berada pada kategori baik hingga sangat baik.

Selain itu, kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Semarang juga terbilang cukup tinggi, dengan lebih dari 90 persen sekolah merasa telah memperoleh informasi dan melakukan persiapan, meski masih menghadapi beberapa hambatan internal maupun eksternal. Namun, distribusi sekolah menengah atas belum sepenuhnya merata karena masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan sehingga perlu penambahan unit sekolah baru untuk pemerataan akses. Secara umum, pendidikan di Kota Semarang menunjukkan kemajuan baik dalam hal mutu dan implementasi kurikulum, tetapi tetap memerlukan perhatian pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya pendidik.

2.1.7. Kondisi Kesehatan dan Lingkungan Kota Semarang

Kota Semarang yang berperan sebagai wilayah pesisir sekaligus pusat kegiatan ekonomi di bagian utara Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kesehatan masyarakat. Permasalahan tersebut mencakup penurunan kualitas udara, pengelolaan limbah yang belum berjalan secara efektif, serta terjadinya fenomena banjir pasang (rob) dan penurunan muka tanah atau *land subsidence*. Selain itu, kondisi iklim tropis juga turut memperburuk situasi dengan meningkatnya kasus penyakit menular seperti demam berdarah dengue. Kombinasi dari berbagai faktor lingkungan tersebut menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam bentuk meningkatnya risiko penyakit pernapasan, penyakit yang ditularkan melalui vektor, gangguan sanitasi, serta meningkatnya tingkat kerentanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kota Semarang dikategorikan sebagai wilayah endemis demam berdarah dengue, di mana berbagai penelitian molekuler dan epidemiologis menunjukkan adanya sirkulasi beragam serotipe virus dengue serta keterkaitan yang kuat antara variabilitas iklim seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan dengan pola kejadian penyakit tersebut. Pengembangan model berbasis iklim di wilayah ini terbukti mampu memprediksi fluktuasi kasus dengue sehingga berpotensi menjadi sistem peringatan dini yang efektif bagi pelaksanaan intervensi kesehatan masyarakat. Kondisi perubahan iklim yang terjadi, disertai dengan karakteristik lingkungan perkotaan seperti adanya genangan air dan sistem sanitasi yang kurang memadai, turut memperbesar peluang berkembang biaknya vektor *Aedes aegypti* sebagai

penyebab utama penularan dengue. Selain itu, pengelolaan sampah yang belum optimal, termasuk praktik pembakaran sampah terbuka dan keterbatasan fasilitas pembuangan akhir, menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan berupa emisi gas berbahaya serta peningkatan risiko penyebaran vektor penyakit.

Dampak lain yang ditimbulkan meliputi gangguan kesehatan pernapasan dan penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. Hasil kajian lokal menegaskan pentingnya peningkatan sistem pengumpulan dan pengolahan sampah, serta pembentukan perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan, guna mengurangi risiko paparan terhadap berbagai permasalahan kesehatan yang bersumber dari kondisi lingkungan yang tidak sehat. Masalah lingkungan (polusi udara, banjir/rob, penurunan tanah, sanitasi buruk) tidak berdiri sendiri; interaksi antar faktor ini memperbesar kerentanan kelompok rentan anak-anak, lansia, dan rumah tangga berpendapatan rendah terhadap dampak kesehatan. Selain itu, perubahan iklim diproyeksikan memperburuk beberapa tekanan ini (mis. naiknya permukaan laut, pola curah hujan ekstrem) sehingga menuntut pendekatan adaptif multisektoral.

2.2. Kelurahan Tanjung Mas

2.2.1. Kondisi Geografis Kelurahan Tanjung Mas

Kelurahan Tanjung Mas merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di kawasan ini berlokasi Pelabuhan Tanjung Emas, yang menjadi pelabuhan utama sekaligus satu-satunya pelabuhan laut di Kota Semarang. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Mas mencapai kurang lebih

29.073 jiwa, dengan komposisi 129 Rukun Tetangga (RT) dan 12 Rukun Warga (RW). Secara geografis, wilayah kelurahan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, sehingga menjadikan Tanjung Mas memiliki karakteristik sebagai kawasan pesisir. (posisi wilayah, batas administrasi, luas wilayah, kondisi topografi, dan kedekatan dengan laut yang menjadi faktor kerentanan rob).

Gambar 2. 2. Peta Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang



Sumber : Pemerintah Kota Semarang

Berdasarkan data resmi, Kelurahan Tanjung Mas memiliki luas administrasi sekitarn 323,782 ha (3,23782 km²). Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Laut Jawa
2. Sebelah Selatan: Kelurahan Purwodinatan
3. Sebelah Barat: Kelurahan Bandarharjo
4. Sebelah Timur: Kelurahan Kemijen

Wilayah Kelurahan Tanjung Mas terbentang hingga ke arah utara yang berbatasan langsung dengan garis pantai, serta berlokasi berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Emas. Karakteristik hidrodinamika pada kawasan muara Kali Banger, Banjir Kanal Timur (BKT), dan Kali Tenggang menyebabkan tingginya potensi abrasi serta genangan banjir rob. Kerentanan tersebut semakin diperparah oleh fenomena penurunan muka tanah yang mencapai kurang lebih 7 cm per tahun, ditambah dengan menurunnya fungsi infrastruktur perlindungan pantai seperti caisson yang mengalami keausan seiring waktu. Secara geografis yang lebih luas, Kota Semarang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan morfologi wilayah bagian utara berupa dataran rendah sempit yang langsung menghadap Laut Jawa, sedangkan bagian selatan didominasi oleh dataran tinggi hingga perbukitan. Kondisi geomorfologi ini menjadikan kawasan pesisir, termasuk Kelurahan Tanjung Mas, sangat rentan terhadap banjir, baik yang dipicu oleh intensitas curah hujan tinggi maupun akibat fenomena pasang air laut (banjir rob).

2.2.2. Kondisi Demografis Kelurahan Tanjung Mas

Kelurahan Tanjung Mas yang terletak di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki karakter demografis cukup kompleks dan mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat yang beragam. Keberagaman ini tampak melalui komposisi jumlah penduduk yang cukup padat, dengan penyebaran struktur usia yang tidak merata. Di satu sisi, kelompok usia produktif mendominasi dan memberikan potensi besar dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk keterlibatan dalam upaya mitigasi bencana. Di sisi lain, keberadaan kelompok rentan seperti anak-anak,

lansia, dan perempuan kepala keluarga turut menambah tingginya tingkat kerentanan wilayah ini terhadap bencana pesisir, terutama banjir rob yang menjadi permasalahan tahunan.

Selain struktur usia, tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas juga bervariasi, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Variasi ini berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki akses informasi yang lebih luas terkait mitigasi, sementara tingkat pendidikan rendah dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses sosialisasi dan peningkatan kapasitas komunitas. Begitu pula dengan mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor kelautan, perdagangan skala kecil, serta jasa yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan. Ketergantungan pada sektor-sektor tersebut membuat masyarakat sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama ketika banjir rob menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.

Karakteristik demografis tersebut bukan hanya menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Tingginya proporsi usia produktif dapat menjadi modal sosial yang kuat, namun keberadaan kelompok rentan menuntut strategi mitigasi yang lebih inklusif dan adaptif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai profil demografis Kelurahan Tanjung Mas menjadi langkah awal yang penting dalam merancang

kolaborasi lintas aktor serta kebijakan penanggulangan banjir rob yang efektif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi demografi Kelurahan Tanjung Mas tercermin melalui dinamika pertumbuhan jumlah dan tingkat kepadatan penduduk yang tersebar di seluruh

Indikator	Nilai	Keterangan
Jumlah Penduduk	± 31.825 Jiwa	Termasuk 15.943 laki-laki dan 15.882 perempuan
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	± 10.825 KK	-
Jumlah RW / RT	12 RW dan 129 RT	-
Luas Wilayah	± 323,728 hektare	Tipologi wilayah: pesisir
Status Agama	Mayoritas Islam; terdapat pemeluk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta kelompok kepercayaan lain	-
Pendidikan	Persentase penduduk dengan pendidikan rendah cukup signifikan: sekitar 31,98% belum tamat SD/ sederajat dan 19,89% belum sekolah/ belum tamat SD, total sekitar 51,87% berada di bawah tingkat SD atau belum sekolah	-
Pekerjaan / Sektor usaha	Profesi dominan: buruh industri (± 8.727 orang), wiraswasta ±1.752, nelayan ±849, pedagang ±387	-

wilayah administrasinya. Seperti yang dapat dilihat dari tabel 2.4

Tabel 2. 4. Data Jumlah Pemeluk Agama di Kota Semarang

Sumber : Profil Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

Berdasarkan tabel 2.4. menggambarkan kondisi demografis dan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Berdasarkan data yang ditampilkan, jumlah penduduk di wilayah ini mencapai sekitar 31.825 jiwa, terdiri atas 15.943 laki-laki dan 15.882 perempuan.

Angka tersebut menunjukkan komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang dapat berdampak pada keseimbangan sosial serta potensi tenaga kerja di wilayah tersebut.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanjung Mas mencapai sekitar 10.825 KK, yang menggambarkan kepadatan hunian cukup tinggi bila dibandingkan dengan luas wilayahnya. Dalam aspek administrasi, wilayah ini terdiri atas 12 Rukun Warga (RW) dan 129 Rukun Tetangga (RT). Struktur sosial yang padat ini menandakan bahwa interaksi sosial masyarakat di wilayah tersebut cenderung kuat, namun juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial apabila tidak diimbangi dengan sistem tata kelola masyarakat yang baik.

Secara geografis, luas wilayah Kelurahan Tanjung Mas adalah $\pm 323,728$ hektare, dengan tipologi wilayah pesisir. Hal ini berarti bahwa sebagian besar wilayahnya berada di kawasan pantai utara Semarang yang berdekatan dengan laut. Letak geografis tersebut menjadikan Tanjung Mas rentan terhadap permasalahan lingkungan seperti banjir rob, intrusi air laut, dan abrasi pantai, namun sekaligus memberikan potensi ekonomi yang besar di sektor kelautan dan perdagangan, terutama karena kedekatannya dengan Pelabuhan Tanjung Emas.

Dalam aspek agama, mayoritas penduduk Kelurahan Tanjung Mas menganut agama Islam, disertai keberagaman pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta kelompok kepercayaan lokal. Kondisi ini

menunjukkan adanya pluralitas keagamaan yang dapat menjadi potensi sosial dalam memperkuat nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan penduduk tergolong masih rendah. Sekitar 31,98% penduduk belum tamat SD atau setara, sedangkan 19,89% belum bersekolah atau tidak tamat SD, sehingga secara keseluruhan sekitar 51,87% penduduk berada pada tingkat pendidikan di bawah SD. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam hal akses dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan formal. Hal ini dapat berimplikasi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal. Rendahnya tingkat pendidikan juga sering berkaitan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir yang umumnya mengandalkan sektor informal.

Dalam bidang pekerjaan atau sektor usaha, masyarakat Tanjung Mas sebagian besar bekerja sebagai buruh industri, dengan jumlah mencapai sekitar 8.727 orang. Selain itu, terdapat 1.752 orang yang berwirausaha, 849 orang bekerja sebagai nelayan, dan 387 orang sebagai pedagang. Data ini menunjukkan bahwa sektor industri menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat, disusul oleh kegiatan wirausaha kecil, perikanan, dan perdagangan. Komposisi pekerjaan tersebut sejalan dengan karakteristik wilayah pesisir yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor kelautan dan kegiatan ekonomi pelabuhan. Namun, dominasi buruh industri juga mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap sektor formal yang padat karya, serta kerentanan ekonomi apabila terjadi fluktuasi di sektor industri atau penurunan aktivitas pelabuhan.

2.2.3. Kondisi Perekonomian Kelurahan Tanjung Mas

Kelurahan Tanjung Mas memiliki posisi strategis dalam konteks ekonomi regional karena di wilayah ini berdiri Pelabuhan Tanjung Emas, yang menjadi satu-satunya pelabuhan utama di Kota Semarang. Kehadiran pelabuhan tersebut menjadikan kawasan ini sebagai simpul penting aktivitas distribusi barang dan jasa, sekaligus membuka peluang kerja yang relatif besar bagi masyarakat setempat. Meskipun demikian, kondisi ekonomi warga mayoritas masih tergolong menengah ke bawah. Sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencaharian pada sektor informal seperti nelayan dan buruh pabrik, yang secara umum menghasilkan pendapatan rendah. Rendahnya tingkat kesejahteraan juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat, di mana sebagian pengeluaran dialokasikan pada kebutuhan non-produktif, seperti rokok maupun renovasi rumah, sehingga ruang bagi peningkatan kualitas hidup dan tabungan menjadi terbatas.

Struktur ekonomi lokal di Tanjung Mas erat kaitannya dengan aktivitas pelabuhan serta sektor jasa dan perdagangan yang berkembang di sekitarnya. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja di sektor lainnya yang terlibat, dengan persentase pekerja sektor lainnya yang terlibat mencapai sekitar 27,91%. Selain itu, kelompok buruh, pegawai negeri, maupun pekerja sektor informal turut memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam peta lapangan pekerjaan di kelurahan ini. Dinamika tersebut memperlihatkan adanya diversifikasi pekerjaan, meskipun tetap didominasi oleh sektor-sektor berpenghasilan rendah dan bergantung pada fluktuasi ekonomi pelabuhan.

Dinamika ekonomi masyarakat Tanjung Mas tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan pesisir yang rentan. Masalah banjir rob, penetrasi air laut, serta fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan usaha. Banyak permukiman warga yang terancam kumuh akibat rob berkepanjangan, dan hal ini kerap menurunkan produktivitas serta efektivitas kegiatan ekonomi, khususnya sektor mikro dan rumah tangga. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah bersama masyarakat menginisiasi berbagai program mitigasi, seperti peninggian jalan, pembangunan talud, serta perbaikan sistem drainase melalui skema PNPM Mandiri Perkotaan. Intervensi ini bukan hanya bertujuan menekan kerugian akibat bencana, tetapi juga mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi dengan menjaga kelancaran mobilitas dan akses menuju kawasan usaha.

Selain sektor kelautan dan pelabuhan, potensi alam lain di wilayah Tanjung Mas sebenarnya juga cukup menjanjikan, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah pemanfaatan buah mangrove di kawasan Tambak Rejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki nilai ekonomi tinggi, pengetahuan masyarakat terhadap potensi ini masih terbatas. Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan selama lima bulan, partisipasi warga meningkat signifikan, bahkan sekitar 60% masyarakat mulai mampu mengolah buah mangrove menjadi produk bernilai tambah, seperti keripik, stik, dan kue basah. Fakta ini menggambarkan adanya peluang ekonomi alternatif yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir Tanjung Mas.

2.2.3. Kondisi Kerentanan terhadap Bencana Banjir Rob di Kelurahan Tanjung Mas

Bencana banjir rob menjadi salah satu permasalahan utama yang hampir setiap tahun melanda kawasan pesisir utara Jawa, termasuk di wilayah Kelurahan Tanjung Emas, Kota Semarang. Wilayah ini menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas genangan air yang dipengaruhi oleh kenaikan muka air laut serta curah hujan ekstrem yang erat kaitannya dengan dinamika perubahan iklim global (BMKG, 2025). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga memperburuk kerentanan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Pada penghujung tahun 2024, tercatat lebih dari 2.000 rumah warga di Kelurahan Tanjung Emas terendam banjir rob, sehingga mengakibatkan gangguan terhadap ketersediaan air bersih, keberlangsungan layanan pendidikan, serta kestabilan kondisi emosional dalam keluarga (BPBD Semarang, 2025).

Dalam kondisi krisis saat ini, perempuan khususnya terutama para ibu rumah tangga, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Mereka tidak hanya mengelola urusan rumah tangga, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak serta memastikan terciptanya komunikasi yang baik di dalam keluarga ketika menghadapi situasi darurat. Meskipun peran mereka begitu sentral, kenyataannya perempuan sering kali tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perumusan kebijakan mitigasi bencana maupun dalam kegiatan pelatihan kesiapsiagaan. Rendahnya tingkat literasi kebencanaan serta terbatasnya akses terhadap informasi resmi, misalnya dari

BMKG, menjadi hambatan utama yang membuat kelompok perempuan semakin rentan ketika bencana terjadi.

2.3. *Collaborative Governance* dalam Mitigasi Banjir Rob

2.3.1. Konsep *Collaborative Governance*

Pemerintah tidak semata-mata mengandalkan kapasitas internal yang dimiliki dalam proses perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program. Adanya keterbatasan dalam hal kemampuan, sumber daya, serta jaringan pendukung menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Upaya kolaboratif ini mencakup kerja sama dengan instansi pemerintahan lain, sektor lainnya yang terlibat, serta masyarakat dan komunitas sipil, sehingga tercipta sinergi yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan atau program yang telah dirancang (Purwanti, 2016:174).

Secara umum, *Collaborative Governance* dapat dipahami sebagai suatu proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari beragam sektor dengan tujuan untuk mengintegrasikan kepentingan masing-masing pihak dalam rangka mencapai tujuan bersama. Menurut Cordery (2004) dan Hartman et al. (2002), konsep ini menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam proses pengambilan keputusan bersama. Ansell dan Gash (2007:544) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai suatu bentuk pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung berpartisipasi bersama aktor-aktor non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, serta dilaksanakan melalui mekanisme

musyawarah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program, atau mengatur aset publik.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain forum kolaboratif yang diinisiasi oleh lembaga publik atau aktor dalam lembaga publik; partisipasi aktif dari aktor non-publik; keterlibatan langsung semua peserta dalam proses pengambilan keputusan yang tidak hanya bergantung pada otoritas publik; forum yang disusun secara formal dan diselenggarakan secara terorganisir; proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesepakatan bersama atau konsensus; serta fokus utama pada kebijakan dan manajemen publik.

Melalui ciri-ciri tersebut, *Collaborative Governance* dapat dimaknai sebagai suatu sistem kerja sama formal yang menghubungkan berbagai aktor publik dan non-publik dalam satu wadah kolaboratif untuk mengelola urusan publik. Namun, Agrawal dan Lemos (2007) dalam Balogh et al. (2011:3) memperluas pemahaman tersebut dengan menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* tidak terbatas pada kolaborasi antara pemerintah dan pihak non-pemerintah saja, melainkan juga melibatkan bentuk kemitraan multipihak atau *multipartner governance* yang mencakup sektor privat, masyarakat, serta komunitas sipil. Kolaborasi ini dibangun atas dasar sinergi peran antar-stakeholder melalui penyusunan rencana dan implementasi kebijakan yang bersifat hibrid, seperti bentuk kerja sama publik-privat maupun privat-sosial, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kompleksitas permasalahan publik.

2.3.2. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Mitigasi Banjir Rob di Kelurahan Tanjung Mas

Mitigasi bencana banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, merupakan hasil dari keterlibatan berbagai aktor yang saling berkoordinasi dalam upaya mengurangi risiko dan dampak dari bencana yang hampir setiap tahun melanda wilayah tersebut. Proses mitigasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai pihak utama, tetapi juga berbagai elemen masyarakat, lembaga teknis, sektor lainnya yang terlibat, serta lembaga akademik yang memiliki peran masing-masing dalam sistem penanganan bencana di kawasan pesisir utara Kota Semarang.

Secara umum, pemerintah memiliki peranan sentral dalam koordinasi dan implementasi kebijakan mitigasi. Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi di tingkat masyarakat, seperti sosialisasi kesiapsiagaan bencana, koordinasi evakuasi, dan penyediaan posko darurat ketika rob terjadi. Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga berperan dalam penanganan teknis dan tanggap darurat, termasuk penyediaan pompa air, peralatan evakuasi, serta pendistribusian logistik kepada warga terdampak. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul laut, pompa air, serta peninggian jalan di sekitar wilayah pesisir. Upaya ini merupakan bentuk

mitigasi struktural yang bertujuan untuk mengurangi volume genangan air laut yang masuk ke wilayah pemukiman.

Sementara itu, aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Basarnas berperan penting dalam fase tanggap darurat, terutama dalam proses evakuasi warga, penyaluran bantuan, serta pengamanan wilayah yang terdampak banjir rob. Lembaga kemanusiaan seperti PMI dan berbagai organisasi sosial juga aktif membantu masyarakat dengan menyediakan dapur umum, layanan kesehatan, serta bantuan logistik pascabencana. Keterlibatan sektor lainnya. Pihak pelabuhan bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pelabuhan serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kenaikan muka air laut.

Selain aktor-aktor pemerintah dan sektor lainnya yang terlibat, masyarakat lokal memiliki peran yang tidak kalah penting. Melalui lembaga sosial kemasyarakatan seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), warga secara aktif terlibat dalam kegiatan gotong-royong membersihkan saluran air, memperbaiki tanggul sementara, dan menyebarkan informasi peringatan dini antarwarga. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kesadaran dan solidaritas sosial masyarakat pesisir.

Koordinasi lintas aktor tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir rob di Tanjung Mas bersifat kolaboratif dan multidimensional. Pemerintah berperan

sebagai pengarah kebijakan, lembaga teknis sebagai pelaksana infrastruktur, aparat keamanan sebagai pelindung, sektor lainnya yang terlibat sebagai mitra pendukung, masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan, dan akademisi sebagai penyedia dasar ilmiah dalam perumusan strategi mitigasi. Meski upaya tersebut terus dilakukan, tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta meningkatnya intensitas rob akibat perubahan iklim global dan penurunan muka tanah di kawasan pesisir.

2.3.3. Bentuk Kolaborasi dalam Mitigasi Banjir Rob di Kelurahan Tanjung Mas

Bentuk kolaborasi dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas menunjukkan adanya kerja sama yang terbangun antara pemerintah, masyarakat, serta keterlibatan pihak lain di luar kedua unsur tersebut. Kolaborasi ini merupakan respons terhadap karakteristik banjir rob yang bersifat berulang dan kompleks, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu aktor saja. Dalam perspektif *Collaborative Governance*, kolaborasi dipahami sebagai proses kerja sama lintas aktor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008). Di Kelurahan Tanjung Mas, kolaborasi diawali dari sinergi antar tingkatan pemerintahan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kelurahan. Pemerintah pusat berperan dalam penyusunan kebijakan makro serta penyediaan anggaran dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir rob, seperti tanggul, sistem pompa, dan perbaikan drainase utama. Pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana teknis yang menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program daerah, sementara pemerintah kelurahan

berfungsi sebagai ujung tombak di tingkat lokal yang mengoordinasikan kegiatan lapangan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan warga terdampak.

Kolaborasi juga terbangun secara langsung antara pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampak banjir rob. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat aktif dalam kegiatan mitigasi, seperti gotong royong membersihkan saluran air, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendukung program penataan dan peninggian permukiman. Bentuk keterlibatan ini mencerminkan pendekatan mitigasi berbasis masyarakat (*community-based disaster management*), di mana masyarakat memiliki peran penting dalam pengurangan risiko bencana karena memiliki pengetahuan lokal yang sesuai dengan kondisi wilayahnya (BNPB, 2018). Partisipasi masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas juga diperkuat melalui kegiatan sosialisasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah kelurahan bekerja sama dengan pihak terkait.

Selain pemerintah dan masyarakat, kolaborasi dalam mitigasi banjir rob juga melibatkan pihak lain seperti lembaga non-pemerintah, akademisi, komunitas sosial, dan relawan kebencanaan. Pihak-pihak ini berperan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, melakukan kajian ilmiah terkait kondisi lingkungan pesisir, serta mendukung kegiatan edukasi dan peningkatan kapasitas warga dalam menghadapi banjir rob. Keterlibatan pihak lain tersebut memperkuat dimensi pengetahuan, sosial, dan keberlanjutan dalam proses mitigasi. Seluruh aktor yang terlibat kemudian diikat dalam mekanisme koordinasi melalui rapat,

forum musyawarah, serta komunikasi lintas pihak guna menyelaraskan program, membagi peran sesuai dengan tugas masing-masing, serta meminimalkan tumpang tindih kegiatan. Dalam teori *Collaborative Governance*, koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan kolaborasi karena mampu membangun kepercayaan dan komitmen antaraktor (Ansell & Gash, 2008).